

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian**

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kantor pelayanan pajak pratama yang ada di daerah Bogor. Peneliti memberikan batasan untuk ruang lingkup penelitian ini pada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Faktor-faktor tersebut terdiri dari kebijakan perpajakan, sanksi administrasi dan undang-undang perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bogor. Metode pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan kontak langsung atau data primer berupa kuisisioner yang akan diisi oleh wajib pajak badan.

#### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode survey yaitu dengan melakukan pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis. Data yang akan di dapatkan dengan menggunakan kuisisioner berupa angket sebagai alat pengumpul data utama. Metode yang dilakukan termasuk dalam penelitian kuantitatif. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh

peneliti untuk dipahami kemudian dibuat kesimpulan (Sugiyono, 2012). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian (Sugiyono, 2012). Untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian ini dihitung dengan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(Moe)^2}$$

Keterangan:

$n$  = jumlah sampel minimal yang diperlukan

$N$  = jumlah populasi

$Moe$  = *margin of error*, tingkat kesalahan yang masih ditoleransi, 10%

## D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuisisioner kepada responden. Kuisisioner diberikan langsung kepada responden oleh peneliti dan responden diminta untuk memberikan nilai pada masing-masing pertanyaan atau pernyataan yang ada. Penilaian yang digunakan dalam kuisisioner menggunakan skala *Likert (Likert Scale)* yang dibagi kedalam lima poin skala yaitu 1 (sangat

tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (Ragu-Ragu). 4 (setuju), 5 (sangat setuju). Berikut ini penjelasan variabel yang digunakan dalam penelitian.

## **1. Perencanaan Pajak (Variabel Y)**

### **a. Deskripsi Konseptual**

Perencanaan pajak merupakan langkah awal untuk melakukan manajemen pajak dan merupakan upaya yang dilakukan manajemen untuk meminimalkan beban biaya pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **b. Deskripsi Operasional**

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel perencanaan pajak dapat diukur dengan tahap-tahap perencanaan sebagai berikut (Sugeng, 2011):

- 1) Menetapkan tujuan dan sasaran perencanaan pajak
- 2) Menganalisis informasi yang ada
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak
- 4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki rencana pajak
- 5) Memperbaharui rencana pajak

## **2. Kebijakan Perpajakan (X1)**

### **a. Deskripsi Konseptual**

Kebijakan perpajakan merupakan unsur-unsur dari berbagai alternatif perpajakan yang tersedia terhadap tujuan yang akan dicapai. Pemilihan unsur-unsur tersebut berhubungan dengan siapa yang akan

dikenakan pajak (subjek pajak), apa yang akan dikenakan pajak (objek pajak), cara perhitungan dan prosedur pajak.

b. Deskripsi Operasional

Kebijakan perpajakan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan tentang sistem perpajakan
- 2) Perbedaan pembebanan tarif pajak
- 3) Pengetahuan tentang *withholding tax*
- 4) Pengetahuan tentang *Self Assesment System*

**3. Sanksi Administrasi (X2)**

a. Deskripsi Konseptual

Sanksi administrasi merupakan hal yang dihindari oleh perusahaan karena termasuk sebuah pemborosan. Biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan dan dapat di alokasikan untuk biaya-biaya yang membuat perusahaan lebih produktif. Untuk menghindarinya perusahaan akan melakukan perencanaan sebaik mungkin sehingga tidak akan dikenakan sanksi administrasi.

b. Deskripsi Operasional

Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi administrasi yaitu (Ketentuan Umum Perpajakan):

- 1) Sanksi Denda
- 2) Sanksi Bunga
- 3) Sanksi Kenaikan

#### **4. Undang-Undang Perpajakan (X3)**

##### **a. Deskripsi Konseptual**

Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan (Wibowo dan Mangoting, 2013). Undang-undang merupakan dasar untuk melakukan perencanaan pajak, agar mengetahui apa saja peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat membuat perencanaan dengan baik tanpa melanggar peraturan perundang-undangan.

##### **b. Deskripsi Operasional**

Indikator yang digunakan untuk mengukur undang-undang perpajakan (Annisa dan Handayani, 2015) yaitu:

- 1) Pemahaman tentang undang-undang perpajakan
- 2) Ketidaktepatan undang-undang perpajakan
- 3) Pengecualian penghasilan bukan objek pajak

**Tabel III.1**  
**Operasional Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>
Perencanaan Pajak (Y)  Sumber: Sugeng (2011)	1. Menetapkan tujuan dan sasaran perencanaan pajak	1. Mengetahui bahwa perencanaan pajak merupakan langkah awal untuk melakukan manajemen pajak. 2. Mengetahui bahwa perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisir pembayaran beban pajak.
	2. Menganalisis informasi yang ada	3. Perusahaan melakukan analisis terhadap informasi yang ada. 4. Perusahaan mencari kebenaran terhadap informasi yang ada.
	3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak	5. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pajak. 6. Mengetahui bahwa manajemen perusahaan menerima masukan atau saran untuk mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak.
	4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki rencana pajak	7. Manajemen perusahaan mencari celah pada undang-undang untuk memanfaatkan dalam menyusun perencanaan pajak. 8. Perusahaan akan mencari kelemahan dari pelaksanaan perencanaan pajak terdahulu untuk memperbaiki perencanaan selanjutnya.
	5. Memperbaharui rencana pajak	9. Perusahaan mengikuti informasi terbaru agar dapat memperbaharui perencanaan pajak. 10. Perusahaan selalu mengikuti perubahan yang terjadi pada peraturan perpajakan.

<p>Kebijakan Perpajakan (X1)</p> <p>Sumber: 1. Annisa dan Handayani (2015) 2. Agneza (2017)</p>	1. Pengetahuan tentang sistem perpajakan	<p>1. Mengetahui bahwa salah satu sistem perpajakan di Indonesia adalah <i>self assessment system</i>.</p> <p>2. Memahami dan mengerti tentang ketentuan peraturan-peraturan perpajakan.</p>
	2. Perbedaan pembebanan tarif pajak	<p>3. Memilih bentuk usaha perorangan karena tarif pajaknya lebih rendah dibandingkan usaha perseroan.</p> <p>4. Mengetahui adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang timbul akibat adanya biaya-biaya yang dikecualikan akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah.</p>
	3. Pengetahuan tentang <i>withholding tax</i>	<p>5. Mengetahui bahwa <i>Withholding tax</i> adalah salah satu kebijakan perpajakan yang pemotongannya dilakukan oleh pihak ketiga.</p> <p>6. Mengetahui bahwa peran <i>Withholding tax</i> penting bagi penerimaan Negara dari sektor pajak.</p>
	4. Pengetahuan tentang <i>Self Assesment System</i>	<p>7. Mengetahui Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk dapat menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajaknya.</p> <p>8. Memahami adanya <i>self assessment system</i> para wajib pajak dapat merencanakan sendiri pajaknya dengan cara menghitung dan membayar pajaknya serta melakukan pembukuan.</p>
<p>Sanksi Administrasi (X2)</p> <p>Sumber: 1. Tanjung</p>	1. Sanksi Denda	<p>1. Mengetahui apabila telat atau tidak melakukan pelaporan SPT akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 100.000 atau Rp 500.000 atau Rp1.000.000.</p> <p>2. Mengetahui apabila semakin kecil pendapatan yang didapatkan</p>

<p>dan Tjondro (2013) 2. Herlina dan Toly (2013)</p>		<p>maka akan semakin kecil denda yang dikenakan. Begitu pun sebaliknya apabila pendapatan semakin besar maka denda akan semakin besar pula.</p>
	2. Sanksi Bunga	<p>3. Mengetahui akan dikenakan sanksi bunga apabila tidak melakukan pembayaran pajak tepat waktu. 4. Mengetahui sanksi bunga yang diberikan ditentukan berdasarkan dengan besarnya pendapatan yang didapatkan.</p>
	3. Sanksi Kenaikan	<p>5. Mengetahui apabila jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPKBT, ditambah dengan sanksi administrasi dapat berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak. 6. Memahami apabila jumlah pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan akan dikenakan sanksi kenaikan 50%</p>
<p>Undang-Undang Perpajakan (X3)</p> <p>Sumber: Annisa dan Handayani (2015)</p>	1. Pemahaman tentang undang-undang perpajakan	<p>1. Mengetahui bahwa undang-undang perpajakan merupakan perkumpulan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perpajakan. 2. Mengerti bahwa Undang-undang perpajakan merupakan acuan dasar dalam melakukan perencanaan pajak.</p>
	2. Ketidaksempurnaan undang-undang perpajakan	<p>3. Merasa masih adanya peraturan perpajakan yang belum diatur dalam undang-undang sehingga menimbulkan penafsiran sendiri atas objek pajak oleh wajib pajak. 4. Menyetujui dengan adanya celah pada undang-undang membuat perusahaan semakin termotivasi</p>

		untuk melakukan perencanaan
	3. Pengecualian penghasilan bukan objek pajak	5. Mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan dari penghasilan lain seperti investasi yang dikenakan PPh final akan lebih kecil. 6. Mengetahui jika sumbangan atau bantuan dan warisan tidak dapat menjadi pengurangan Penghasilan Kena Pajak.

*Sumber: Data diolah Penulis*

## E. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini dilakukan pengujian awal yaitu dengan uji instrument penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji realibilitas serta uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Selanjutnya pengujian hipotesis dengan melakukan uji regresi liner berganda yang terddiri dari uji F, uji t dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

### 1. Uji Instrument Penelitian

Yang pertama dilakukan adalah melakukan analisis dengan uji instrument yang terdiri dari pengujian validitas dan pengujian reliabilitas yang dilakukan untuk mengetahui apakah instrument yang digunakan telah layak dan menilai kesungguhan dan kebenaran jawaban responden.

#### a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrument alat ukur telah menjalankan fungsi ukurannya (Wijaya,

2012). Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali, 2013). Sugiyono (2012) menyatakan syarat minimum agar dapat dianggap memenuhi syarat adalah  $r \geq 0,3$ .

#### **b. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Pengujian reliabilitas berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan terhadap instrument. Suatu instrument dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (konsisten) jika hasil dari pengujian instrument tersebut menunjukkan hasil yang tetap (Wijaya, 2012). Ghozali (2011) menyatakan bahwa suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,6.

### **2. Uji Asumsi Klasik**

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal (Wijaya, 2012). Data yang dikatakan normal apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 dan plot data tersebut berada di sekitar garis melintang.

### **b. Uji Heterokedastisitas**

Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas karena data *cross section* memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kesil, sedang dan besar). Salah satu cara untuk melihat adanya problem heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dan residualnya (Wijaya, 2012).

### **c. Uji Multikolinieritas**

Uji multikoleniaritas merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variable independen). Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikoleniaritas (Wijaya, 2012). Korelasi dapat dikatakan bebas dari multikoleniaritas apabila memiliki nilai VIF <10 dan nilai Toleransi mendekati 1 (Ghozali, 2011).

## **3. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji atau mengetahui apakah variabel-variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Model regresi linear berganda ini digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen berupa kebijakan perpajakan, sanksi administrasi

dan undang-undang perpajakan terhadap variabel dependen berupa perencanaan pajak (*tax planning*). Uji regresi terdiri dari uji F dan uji t. Model regresi linear berganda ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan

Y = Perencanaan Pajak

a = bilangan konstanta

$\beta_1$  = koefisien regresi variabel kebijakan perpajakan

$\beta_2$  = koefisien regresi variabel sanksi administrasi

$\beta_3$  = koefisien regresi variabel undang-undang perpajakan

$X_1$  = kebijakan perpajakan

$X_2$  = sanksi administrasi

$X_3$  = undang-undang perpajakan

e = eror yang ditolerir

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji statistik F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh nyata dalam variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Jika nilai signifikan F lebih besar dari 0,05 maka terdapat pengaruh secara bersama-sama dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap

variabel dependen. Namun jika nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### **b. Uji statistik t**

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu kebijakan perpajakan, sanksi administrasi dan undang-undang perpajakan berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen yaitu perencanaan pajak. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel masing-masing independen maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaan. Derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai signifikan t lebih besar dari 0,05 maka model regresi tidak dapat digunakan atau ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikan t kurang dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan atau diterima (Ghozali, 2011).

#### **c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai  $R^2$  kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).